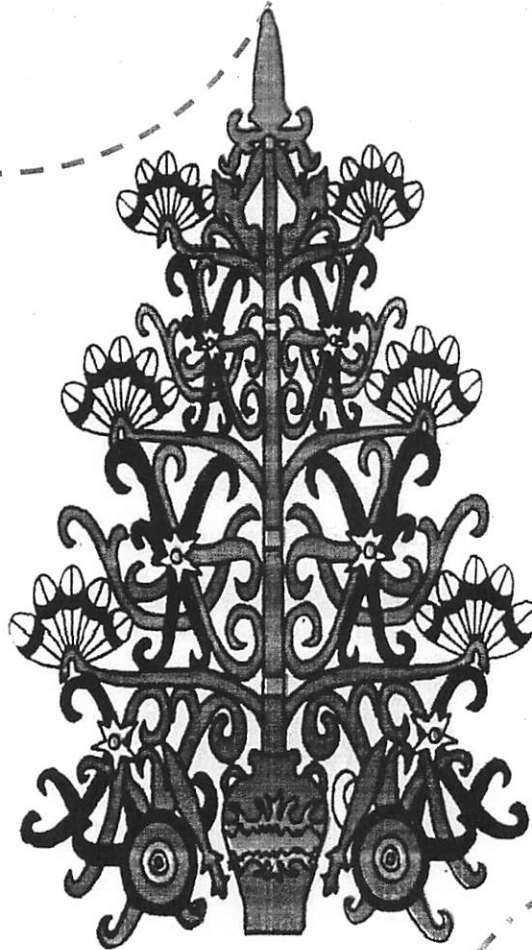




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KAPUAS**

Jl. Tambun Bungai No. 7 Kuala Kapuas Telp. 0513-22013 Fax 0513-24300

Email : disperindagkapuas@yahoo.co.id Blog : www.disperindag-kopumkmpks.blogspot.com

PEBRUARI 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas perkenan-Nya sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kapuas dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2013-2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini berpedoman pada PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat guna memberikan informasi penyusunan kebijakan pada waktu mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governace* ditataran Pemerintah Daerah.

Kuala Kapuas, Februari 2017

Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kapuas,

H. SUPARMAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641113 198702 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kondisi Umum Organisasi	2
1.3 Aspek Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Visi dan Misi	11
2.2 Penetapan Kinerja (PK)	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	1	Distribusi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Berdasarkan Golongan Tahun 2015...	5
Tabel	2	Distribusi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas Berdasarkan Golongan dan Ruang Tahun 2015	5
Tabel	3	Jumlah PNS Menurut Klasifikasi Pendidikan Tahun 2015.....	5
Tabel	4	Target Pendapatan dan Anggaran Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas Tahun 2015.....	17
Tabel	5	Kategori Pengukuran Kinerja	21
Tabel	6	Capaian Kinerja Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Kapuas....	22
Tabel	7	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya kompetensi SDM/Aparatur	23
Tabel	8	Perbandingan Pencapaian Sasaran Meningkatnya kompetensi SDM/Aparatur dari Tahun 2012-2015.....	23
Tabel	9	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	24
Tabel	10	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Tahun 2012-2015	25
Tabel	11	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	26
Tabel	12	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM dari Tahun 2012-2015	27
Tabel	13	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah	27
Tabel	14	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah usaha kecil dan menengah dari Tahun 2012-2015	28
Tabel	15	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	29
Tabel	16	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat dari Tahun 2012-2015	30



Tabel	17	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	31
Tabel	18	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal dari Tahun 2012-2015.	31
Tabel	19	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM	32
Tabel	20	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM dari Tahun 2012-2015	33
Tabel	21	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal	34
Tabel	22	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal dari Tahun 2012-2015	35
Tabel	23	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor	36
Tabel	24	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor dari Tahun 2012-2015	36
Tabel	25	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Perijinan Usaha	37
Tabel	26	Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya Perijinan Usaha dari Tahun 2012-2015	38
Tabel	27	Evaluasi Pencapaian Sasaran Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	39
Tabel	28	Perbandingan pencapaian sasaran Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen dari Tahun 2012-2015	40
Tabel	29	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM	41
Tabel	30	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Kelembagaan dan Permodalan K-UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun 2016	42
Tabel	31	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018	42
Tabel	32	Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas	50
Tabel	33	Realisasi Anggaran Pembangunan dengan rincian per Jenis Mata Anggaran	53



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 ini disusun. LKIP ini menyajikan **capaian indikator kinerja sasaran** sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 memuat capaian kinerja berdasarkan pada Misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas tentang Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018. Untuk mencapai misi terdapat 11 sasaran strategis dan 16 indikator yang telah ditetapkan dengan rincian pencapaian sebagai berikut.

- ⊕ Misi pertama terdiri dari 2 sasaran dan 2 indikator dengan 2 indikator mencapai target tahunan.
- ⊕ Misi Kedua terdiri dari 2 sasaran dan 2 indikator dengan 1 indikator mencapai target tahunan.
- ⊕ Misi Ketiga terdiri dari 1 sasaran dan 2 indikator dengan 1 indikator mencapai target tahunan.
- ⊕ Misi Keempat terdiri dari 2 sasaran dan 2 indikator dengan ke-2 indikator tidak mencapai target tahunan.
- ⊕ Misi Kelima terdiri dari 4 sasaran dan 8 indikator dengan 4 indikator mencapai target tahunan.



Dari sajian capaian kinerja pada Bab III terlihat adanya keberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di atas seratus persen, tetapi ada juga yang capaiannya di bawah seratus persen. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

1.1. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XII/MPRI/1998* dan *UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada *INPRES No. 7 Tahun 1999*, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1.2. KONDISI UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 159 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas menjabarkan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pembinaan dan pengorganisasian pengembangan industri kecil dan menengah, industri agro dan kimia, logam, mesin, tekstil dan aneka serta industri alat transportasi dan telematika
3. Penetapan bidang usaha industri, perdagangan koperasi dan UMKM prioritas Kabupaten
4. Pemberian perijinan bidang industri dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten
5. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri, perdagangan koperasi dan UMKM di Kabupaten
6. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM
7. Pembinaan dan pengorganisasian pengembangan bidang perdagangan ekspor dan impor
8. Pembinaan dan pengawasan dalam pemberian ijin usaha perdagangan
9. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi wajib daftar perusahaan



10. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan
11. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala nasional
12. Pembinaan dan pengkoordinasian perlindungan konsumen, kemetrollogian, pengawasan barang beredar dan penyelesaian sengketa konsumen serta pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa
13. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi
14. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten
15. Bimbingan pengawasan fasilitasi bantuan modal usaha bidang industri, perdagangan, koperasi UMKM serta penilaian pemeringkatan koperasi
16. Pembinaan dan pengembangan bidang usaha kecil menengah dan usaha mikro bidang industri pertanian, perdagangan, hortikultura dan industri jasa perdagangan dan aneka usaha serta peningkatan kemitraan dan menumbuhkan kembangkan wirausaha baru.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas** dibantu oleh jajaran struktural dan fungsional :
2. **Sekretaris, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha;
3. **Bidang terdiri dari :**
 - a. **Bidang Industri, membawahkan :**
 - 1) Seksi Industri Kimia dan Agro;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin Tekstil dan Aneka;
 - 3) Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika;



b. Bidang Perdagangan, membawahkan :

- 1) Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
- 2) Seksi Ekspor dan Impor;
- 3) Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;

c. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian, membawahkan :

- 1) Seksi Kerjasama Informasi dan Perlindungan Konsumen;
- 2) Seksi Kemetrolagian;
- 3) Seksi pengawasan Barang Beredar dan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

d. Bidang Koperasi, membawahkan :

- 1) Seksi Koperasi Konsumen dan Produsen;
- 2) Seksi Koperasi Aneka Usaha;
- 3) Seksi Kelembagaan Koperasi dan Penyuluhan;

e. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :

- 1) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Pertanian, Perdagangan dan Hortikultura;
- 2) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Jasa, Perdagangan dan Aneka Usaha;
- 3) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan;

1. Bidang Fasilitas dan Pembiayaan, membawahkan :

- 1) Seksi Permodalan;
- 2) Seksi Simpan Pinjam;
- 3) Seksi Penilaian Kesehatan dan Pemeringkatan Koperasi;

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebanyak 59 orang, terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|------------|
| a. Jabatan Struktural | : 29 orang |
| b. Jabatan Fungsional Umum | : 20 orang |
| c. Honorer | : 10 orang |



**Tabel 1. Distribusi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
UMKM Kabupaten Kapuas Berdasarkan Golongan Tahun 2016**

No	Unit Eselon	Golongan				Total (org)
		IV	III	II	I	
1	Sekretariat	2	8	3	1	14
2	Bid. Perdagangan	1	6	-	-	7
3	Bid. Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	1	4	-	-	5
4	Bid. Industri	1	4	-	-	5
5	Bid. Koperasi	1	6	-	-	7
6	Bid. Fasilitas dan Pembiayaan	1	5	1	-	7
7	Bid. UMKM	1	3	-	-	4
Jumlah		8	36	4	1	49

Sumber : Bagian Tata Usaha Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas Tahun 2016

**Tabel 2. Distribusi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
UMKM Kabupaten Kapuas Berdasarkan Golongan dan Ruang
Tahun 2016**

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1	Gol I	0	1	0	0	1
2	Gol II	1	1	0	2	4
3	Gol III	1	10	7	18	36
4	Gol IV	6	1	1	0	8
Jumlah		8	13	8	20	49

Sumber : Bagian Tata Usaha Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas Tahun 2016

Tabel 3. Jumlah PNS Menurut Klasifikasi Pendidikan Tahun 2016

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	1	1	-	-	2
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	-	17	-	17
4	D - 1	-	-	-	-	-
5	D - 2	-	-	-	-	-
6	D - 3	-	2	3	-	5
7	D - 4	-	-	-	-	-
8	S - 1	-	-	16	6	22
9	S - 2	-	-	1	2	3
10	S - 3	-	-	-	-	-
Jumlah		1	3	37	8	49

Sumber : Bagian Tata Usaha Dinas Perindagkop UMKIRI Kab. Kapuas Tahun 2016

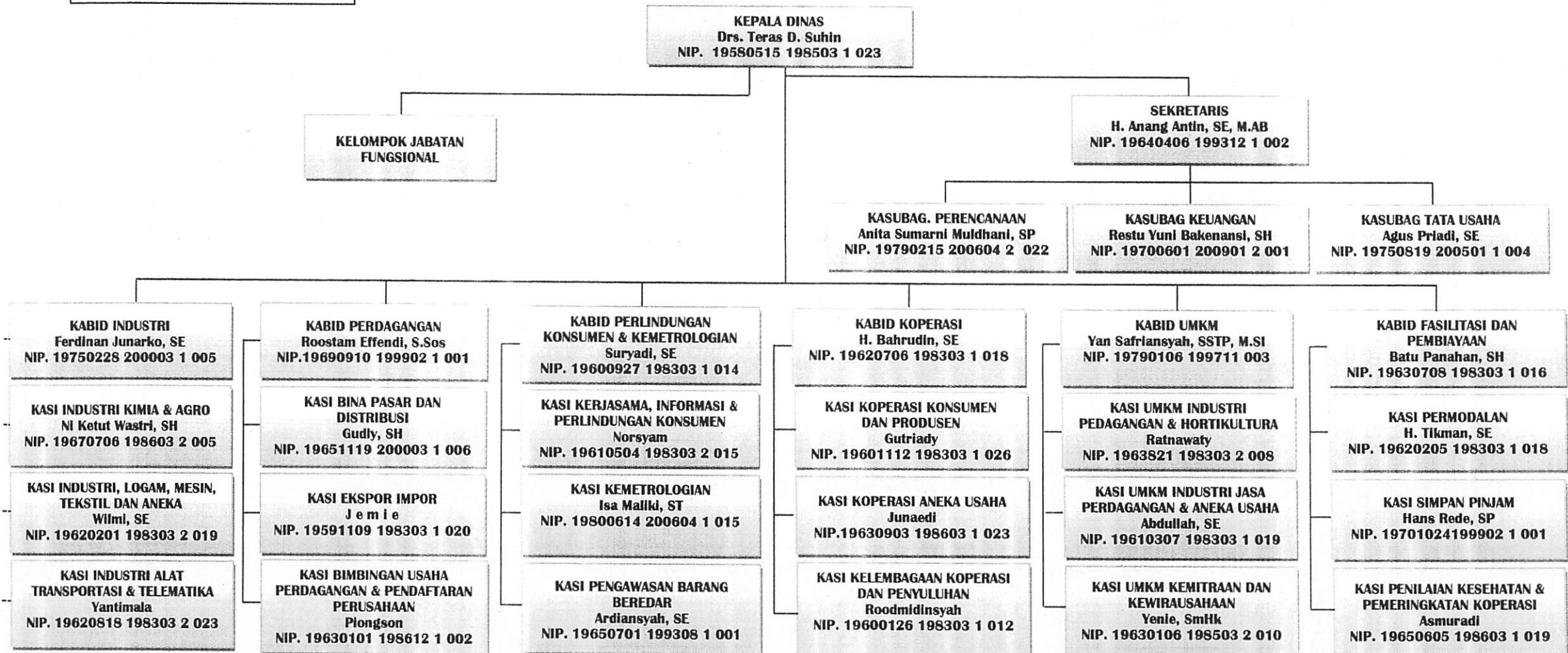


Tingkat pendidikan merupakan salah satu variabel penentu pertumbuhan ekonomi dalam skala makro. Tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan tenaga kerja terlatih yang diharapkan memiliki pola pikir, pengetahuan dan etos kerja yang diperlukan dalam pembangunan. Dari data tersebut, terlihat lebih dari 60 % PNS lingkup Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas mengecap perguruan tinggi (D3, S1 dan S2).



Berdasarkan Perda Kab. Kapuas
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 07 Juli 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM KABUPATEN KAPUAS





1.3. ASPEK STRATEGIS

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat dan memperkuat keterkaitan serta saling mendukung antara industri dan pertanian yang ditunjang dengan sektor jasa dan kualitas SDM. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengembangan industri dapat lebih efisien dengan wawasan kemas depan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan daya saing tinggi.

Program pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pementapan struktur ekonomi daerah.

Kebijakan pemerintah yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan dibidang koperasi, UMKM, maka perlu didukung oleh struktur organisasi kelembagaan dinas yang



dinamis. Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi, UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*). Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas dihadapkan pada permasalahan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Secara internal menyangkut keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumberdaya manusia sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan. Secara eksternal terkait dengan kualitas produk lokal daerah masih rendah utamanya dari sisi pemasaran, kualitas SDM pengelola koperasi relatif masih rendah, kemampuan untuk mengakses modal utamanya pada perbankan masih lemah.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan tantangan/kendala (*Threats*), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berdisiplin dan sarana dan prasarana yang memadai
2. Terkendalinya peredaran produk-produk yang dijual dipasar. Masyarakat/konsumen terlindungi dari makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa.



3. Terpantaunya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang strategis serta meningkatnya kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta tersedianya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau.
4. Terbangunnya pasar-pasar tradisional
5. Pengembangan industri kecil dan menengah yang diukur melalui pendekatan daya saing industri kecil dan menengah di Kabupaten Kapuas.
6. Adanya kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi usaha koperasi dan UMKM.
7. Tersedianya tenaga ahli penera



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kabupaten/Kota Kapuas hendak di bawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena-fenomena yang berkembang serta tuntutan-tuntutan pelayanan masyarakat, ditetapkan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas :

**TERWUJUDNYA IKLIM INDUSTRI, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG
MAJU DAN MANDIRI SEBAGAI ELEMEN PENGGERAK
EKONOMI PEMBANGUNAN**

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan; Menciptakan sinergi dalam aspek perekonomian di Kabupaten Kapuas salah satunya adalah membesarkan embrio usaha kecil menengah di masyarakat, koperasi dan industri perdagangan lainnya baik yang kecil, menengah, UKM maupun yang besar (investor) agar tercipta penyangga-penyangga percepatan ekonomi secara menyeluruh di masyarakat.

Memberdayakan masyarakat dalam berwirausaha dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah memerlukan kemampuan mengarahkan, membina serta memfasilitasi usaha tersebut dalam membentuk pelayanan asistensi, konsultasi hingga pelayanan perijinan yang dipersyaratkan agar legalnya usaha mereka. Tahapan pemberdayaan ini akan menjadi bagian penting mengembangkan perekonomian berbasis masyarakat.



Perubahan situasi negara ini mempengaruhi berbagai perubahan perspektif kelembagaan, kinerja dan budaya instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam dunia industri, perdagangan dan koperasi. Maka diperlukan kemampuan untuk menganalisa dan mempertimbangkan secara cermat agar tercapai penggerak perekonomian.

Memperbesar pelayanan, memperkecil birokrasi pelayanan sehingga memperkecil *cost* pelayanan tersebut, sehingga peluang investasi yang dilirik oleh pengguna manfaat tidak menurun sejalan tuntutan otonomi memperbesar penghasilan daerah khususnya dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Akan halnya pendukung tetap (*permanent supporter*) seperti sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) harus dioptimalkan secara proporsional dengan memperhatikan lingkungan, hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya, dengan tahapan yang direncanakan pencapaiannya, upaya menterjemahkan kemampuan tersebut bisa lebih baik lagi. Tentu dengan pertimbangan kompetensi, keuangan dan tuntutan baik *stakeholder* maupun masyarakat. Dengan tujuan yang paripurna untuk pembangunan lokal, perspektif nasional.

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas;
2. Meningkatkan Kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar serta menjalin hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar wilayah, regional dan internasional;



3. Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi;
4. Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi indagkop dan UMKM;
5. Meningkatkan penggunaan sumber daya lokal, kelancaran distribusi, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

Maksud perumusan misi ini, yaitu ; Meningkatkan kualitas pelayanan yang menghasilkan produk seperti bimbingan/asistensi konsultasi industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penerima manfaat (*stakeholder*) akan bertumbuh kembang sesuai trend pasar, di harapkan Kabupaten Kapuas memberikan peluang investasi baik skala kecil maupun skala besar dan sekaligus memberikan kepastian hukum tentang tertibnya usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas, sedangkan penyangga perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di daerah yang cenderung tidak terpengaruh krisis adalah UMKM dan Koperasi. Kelompok ini merupakan asset yang harus diberikan perhatian khusus demi perkembangannya agar mampu menjadi penggerak kokohnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas; Selanjutnya memberdayakan masyarakat untuk berwirausaha, mengembangkan industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah adalah menanamkan budaya bisnis, makro dan mikro, hal ini menandakan keterlibatan masyarakat dalam berusaha meningkatkan taraf hidupnya semakin baik dengan hasil akhir meningkatkan pendapatan daerah di bidang usaha tersebut.

2.1.3 Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran ataupun implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan di tetapkannya tujuan strategis, diharapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dapat secara lebih tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misinya dengan mempertimbangan sumberdaya yang dimiliki, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang belum dapat secara utuh sinergis dengan kebijakan daerah yang ditetapkan kemudian.

Perumusan tujuan strategis tersebut juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur, memberikan fasilitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi untuk



mengukur sendiri sejauh mana Visi dan Misi Organisasi telah dapat dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu setiap tujuan strategis yang ditetapkan, akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Adapun Tujuan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kabupaten Kapuas yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Menumbuhkan kemitraan usaha bagi koperasi dan UMKM dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri
3. Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM
4. Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi indagkop dan UMKM.
5. Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku produk lokal.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun tujuan beserta uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia/aparatur
2. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan
3. Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM
4. Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah
5. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat
6. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal
7. Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM
8. Meningkatnya industry pengguna bahan baku produk lokal



9. Meningkatnya perijinan usaha
10. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen

2.2. PENETAPAN KINERJA (PK)

Penetapan Kinerja Tahun 2015 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat 14 program dengan 16 indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan / sasaran.

Adapun uraian lebih lanjut dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM KABUPATEN KAPUAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia/aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek (orang)	15
2	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	8
3	Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/ besar dan IKM	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	15
4	Meningkatnya jumlah UKM	Jumlah UKM	2159
5	Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi yang mempunyai peringkat A/sehat	423 6
6	Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	40
7	Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM	Jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM	70.326.614
8	Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal	Jumlah industri menggunakan bahan baku produk lokal meningkat Jumlah industri UKM meningkat	260 340
9	Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor	Jumlah ijin industri meningkat Nilai ekspor meningkat (US\$) Volume ekspor meningkat (Ton)	75 40.000.000,00 15.000
10	Meningkatnya perijinan usaha	Jumlah ijin usaha meningkat Jumlah pedagang kecil menengah dan besar meningkat	160 160
11	Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar	4



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disperindagkop UMKM
Kabupaten Kapuas Tahun 2016

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	921.496.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	661.344.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.845.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110.043.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.500.000	
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	24.500.000	
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	66.290.000	
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah	71.499.000	
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	230.929.000	
10	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	95.860.200	
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	323.500.000	
12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.584.239.000	DAK/DAU
13	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	89.600.000	
14	Program Peningkatan Kapasitas Iptek system produksi	55.250.000	
15	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	83.750.000	
16	Program Pengembangan Sentra-sentra yang dapat diakses masyarakat	376.931.000	
Total		4.771.577.000	

** (Pagu setelah perubahan anggaran)



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Data Anggaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Target Pendapatan dan Anggaran Dinas Perindagkop UMKM Kab. Kapuas Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran/Target
I	2	3
I	PENDAPATAN	
	I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	
	Hasil Retribusi Daerah	23.000.000,-
	a) Retribusi Jasa Umum	
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,-
	b) Retribusi Jasa Usaha	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa aula)	15.000.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.000.000,-
II.	BELANJA PROGRAM	
	I. PRGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	142.382.000,-
	2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	86.900.000,-
	3) Penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	59.713.500,-
	4) Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.130.000,-
	5) Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.302.000,-
	6) Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	55.302.000,-
	7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.850.000,-
	8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.850.000,-
	9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.640.000,-
	10) Penyediaan makanan dan minuman	56.380.000,-
	11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	352.046.500,-
	12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80.000.000,-
	Sub Jumlah	921.496.000,-
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	1) Pembangunan gedung kantor	405.070.000,-
	2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	105.780.000,-
	3) Pengadaan peralatan gedung kantor	94.453.000,-
	4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.500.000,-
	5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.541.000,-
	6) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	1.000.000,-
	Sub Jumlah	661.344.000,-
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	55.845.000,-
	Sub Jumlah	55.845.000,-



1	2	3
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	110.043.000,-
	Sub Jumlah	110.043.000,-
		-
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.500.000,-
	2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000,-
	3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.000.000,-
	4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,-
	Sub Jumlah	20.500.000,-
	6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
	1) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	24.500.000,-
	Sub Jumlah	24.500.000,-
	7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	66.290.000,-
	Sub Jumlah	66.290.000,-
	8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah	
	1) Pengembangan klaster bisnis	31.000.000,-
	2) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	20.499.000,-
	2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,-
	Sub Jumlah	71.499.000,-
	9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	25.000.000,-
	2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	140.929.800,-
	3) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	10.000.000,-
	4) Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	25.000.000,-
	5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.000.000,-
	Sub Jumlah	230.929.800,-
	10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
	1) Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	11.000.000,-
	2) Pengembangan UPT kemetrolagian daerah	61.870.500,-
	3) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	22.989.700,-
	Sub Jumlah	95.860.200,-



1	2	3
	11. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
	1) Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	298.500.000,-
	2) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan	25.000.000,-
	Sub Jumlah	323.500.000,-
	12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
	1) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	649.710.000,-
	2) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	10.000.000,-
	3) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	774.529.000,-
	4) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (APBD)	150.000.000,-
	Sub Jumlah	1.584.239.000,-
	13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	1) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	79.600.000,-
	2) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	10.000.000,-
	Sub Jumlah	89.600.000,-
	14. Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
	1) Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	21.000.000,-
	2) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	34.250.000,-
	Sub Jumlah	55.250.000,-
	15. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
	1) Pembinaan kemampuan teknologi industri	83.750.000,-
	Sub Jumlah	83.750.000,-
	16. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	
	1) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	376.931.000
	Sub Jumlah	376.931.000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM	4.771.577.000,-

**(Pagu setelah perubahan anggaran)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2016.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan realisasinya.

Pecapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit, dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :



- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut di atas dapat diperoleh dengan menggunakan skala pengukuran kinerja dalam hal ini skala pengukuran ordinal yaitu:

Tabel 5. Kategori Pengukuran Kinerja

Urutan	Interval Capaian	Kategori
I	85 – 100	Sangat Berhasil
II	70 – 84	Berhasil
III	55 – 69	Cukup Berhasil
IV	< 55	Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tercapainya kinerja yang diharapkan.

▪ **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dikelompokkan ke dalam :

- Masukan (*inputs*), adalah segala sesuai yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- Keluaran (*outputs*), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- Hasil (*outcomes*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;



- d. Manfaat (*benefits*), adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*), adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016, implementasi Rencana Strategis pada Tahun 2016 mencakup 49 kegiatan dalam 16 program untuk mendukung 11 sasaran strategis. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2016 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Kapuas

No	Uraian	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia/aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	100
2	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100
3	Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/ besar dan IKM	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	113,33
4	Meningkatnya jumlah UKM	Jumlah UKM	178,55
5	Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat	Jumlah koperasi aktif	78,96
		Jumlah koperasi yang mempunyai peringkat A/sehat	133,33
6	Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	-
7	Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM	Jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM	-
8	Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal	Jumlah industri menggunakan bahan baku produk lokal meningkat	148,85
		Jumlah industri UKM meningkat	113,82
		Jumlah ijin industri meningkat	46,67
9	Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor	Nilai ekspor meningkat (US\$)	28,85
		Volume ekspor meningkat (Ton)	58,51
10	Meningkatnya perijinan usaha	Jumlah ijin usaha meningkat	146,87
		Jumlah pedagang kecil menengah dan besar meningkat	146,87
11	Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar	75,00
Total			67,42

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2016, terdapat 7 sasaran strategis yang



mencapai lebih dari 100 %. Capaian untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



MISI

Meningkatkan kinerja aparat untuk mewujudkan pelayanan prima dengan manajemen yang efisien

➤ **Sasaran I** “Meningkatnya kompetensi SDM/Aparatur”, nilai capaian kerjanya 100 %. Indikator keberhasilan program ini adalah dengan berhasilnya 15 (lima belas) orang pegawai mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan/keahlian para pegawai.

Tabel 7 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya kompetensi SDM/Aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Orang	15	15	100
Capaian Sasaran					100

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp. 110.043.000,- dengan realisasi Rp. 106.176.750,-. Yang berasal dari dana APBD.

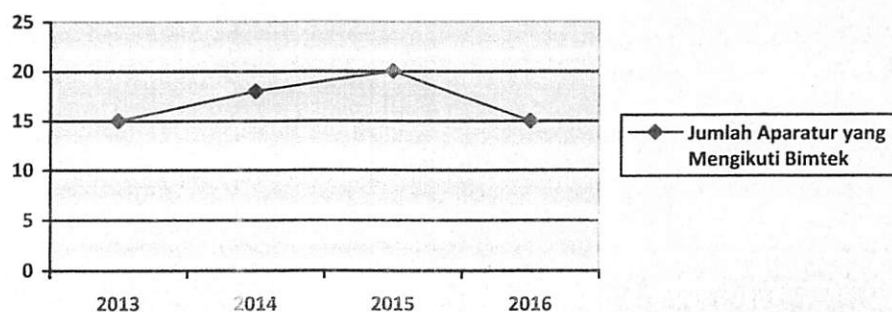
Capaian sasaran Meningkatnya kompetensi SDM/Aparatur ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena alokasi dana untuk program ini juga menurun. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Tabel 8 Perbandingan Pencapaian Sasaran Meningkatnya kompetensi SDM/Aparatur dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
I	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Orang	15	18	20	15



Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya kompetensi SDM/Aparatur
Tahun 2013-2016



Sasaran 2 “Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”, nilai capaian kinerjanya adalah 100 %. Indikator keberhasilan program ini adalah dengan penyusunan 8 (delapan) dokumen penyusunan laporan capaian kinerja SKPD.

Tabel 9 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	8	8	100
Capaian Sasaran					100

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp. 20.500.000,- dengan realisasi Rp. 20.491.000,-. Yang berasal dari dana APBD.

Dokumen perencanaan yang disusun yaitu :

1. Rencana Kerja 2017
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Penetapan Kinerja (Tapkin)
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Laporan PraTeptra
7. Paparan Rakordal
8. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

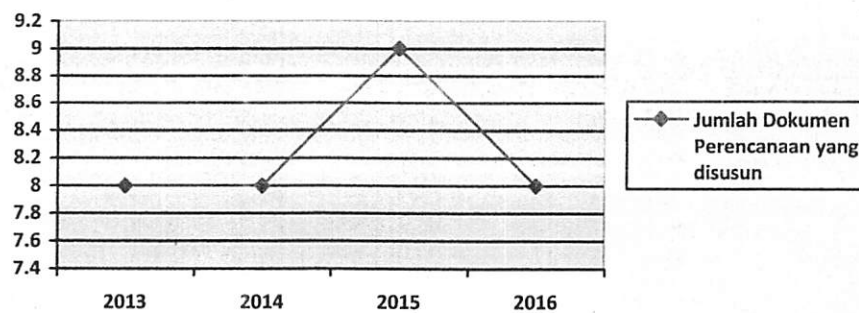


Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran mencapai 100 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran 100 % dengan hasil *Sangat baik* atau *Sangat berhasil*, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dinilai **sangat baik atau sangat berhasil**.

Tabel 10 Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
I	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	8	8	9	8

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2013-2016



2

MISI

Meningkatkan Kemitraan Koperasi dan UKM dengan Pengusaha besar serta menjalin hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar wilayah, regional dan internasional

✦ **Sasaran I** "Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 telah berupaya melaksanakan



indikator kinerja sasaran di atas melalui 1 (satu) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

Tabel II Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/ besar dan IKM

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/ besar dan IKM	Unit	15	17	113,33
Capaian Sasaran					113,33

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Peningkatan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan anggaran Rp. 24.500.000,- dengan realisasi Rp. 24.486.000,-. Yang berasal dari dana APBD.

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran adalah 113,33 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran ini dinilai hasil *Sangat baik atau Sangat berhasil*, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dinilai **sangat baik atau sangat berhasil**.



Keikutsertaan UMKM Pada Event Pameran Gebyar UMKM, Koperasi, PKBL dan Produk Unggulan Daerah di Yogyakarta sebagai ajang Promosi Produk UMKM

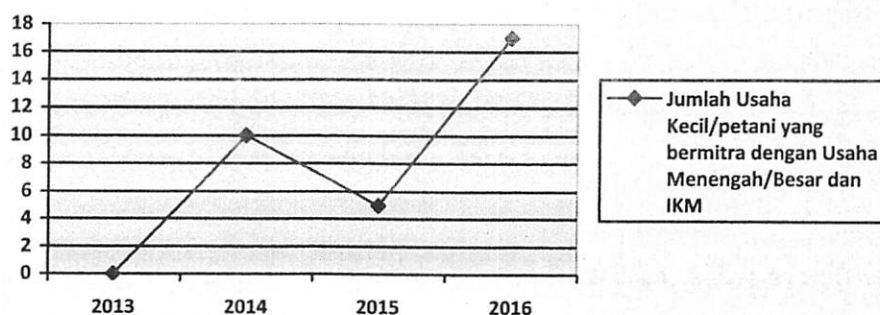


Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Tabel 12 Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
I	Jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM	Orang	-	10	5	17

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM Tahun 2013-2016



✦ Sasaran "Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah" Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran di atas melalui 1 (satu) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Tabel 13 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Jumlah usaha kecil dan menengah	Unit	2159	3855	178,55
Capaian Sasaran					178,55

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil



Menengah dengan anggaran Rp. 66.290.000,- dengan realisasi Rp. 66.190.000,-. Yang berasal dari dana APBD.

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran mencapai 178,55 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran berada di atas 100 % dengan hasil *Sangat baik atau Sangat berhasil*, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dinilai **sangat baik atau sangat berhasil**.



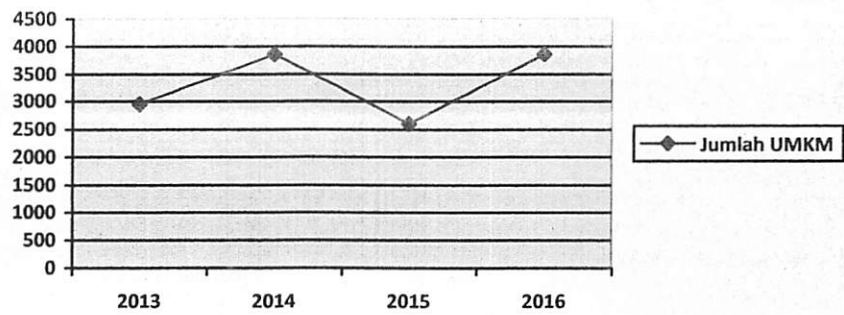
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Tabel 14 Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah usaha kecil dan menengah dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
I	jumlah usaha kecil dan menengah	Orang	2950	3855	2600	3855

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah Tahun 2013-2016



3

MISI

Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi

± Sasaran "Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran di atas melalui 5 (lima) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
- 2) Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- 4) Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tabel 15 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	423	334	78,96
2	Jumlah koperasi yang mempunyai peringkat A/sehat	Koperasi	6	8	133,33
Capaian Sasaran					106,14

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan anggaran Rp. 230.929.800,- dengan realisasi Rp. 230.839.800,-. Yang berasal dari dana APBD.



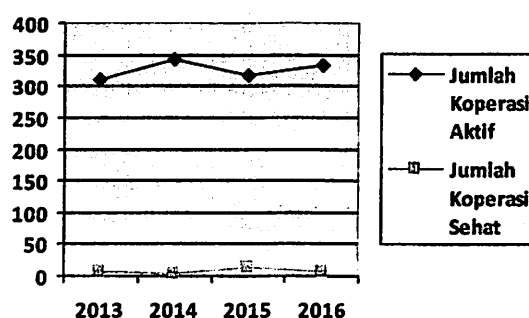
Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran mencapai 106,14 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran berada di atas 100 % dengan hasil *Sangat baik atau Sangat berhasil*, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dinilai **sangat baik atau sangat berhasil**.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Tabel 16 Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	309	342	317	334
2	Jumlah koperasi yang mempunyai peringkat A/sehat	Koperasi	5	3	12	8

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat Tahun 2013-2016



4

MISI

Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi indagkop dan UMKM

- ↓ Sasaran "Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal". Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran di atas melalui 2 (dua) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan, yaitu :



- 1) Pengembangan klaster bisnis
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tabel 17 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Unit	40	-	0
Capaian Sasaran					0

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan anggaran Rp. 51.000.000,- dengan realisasi Rp. 50.566.750,-. Yang berasal dari dana APBD.

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran adalah 0 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran ini dinilai **tidak baik** atau **tidak berhasil**. Hal ini disebabkan tidak ada penyaluran karena ada pemangkasan anggaran.

Berikut perbandingan capaian kinerja Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Tabel 18 Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
I	Jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal	Unit	25	-	4	-

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal Tahun 2013-2016



- 5) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
- 6) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Tabel 21 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah industri pengguna bahan baku produk lokal	IKM	260	387	148,85
2	Jumlah industri UKM meningkat	IKM	340	387	113,82
3	Jumlah ijin industri meningkat	TDI	75	35	46,67
Capaian Sasaran					103,11

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Pengembangan Industri Industri Kecil dan Menengah dengan anggaran Rp. 89.600.000,- dengan realisasi Rp. 89.549.500,- ; Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rp 55.250.000,- dengan realisasi Rp 54.822.750,- ; Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan anggaran Rp. 83.750.000,- dengan realisasi Rp. 83.535.500,- dan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dengan anggaran Rp. 376.931.000,- dengan realisasi Rp. 371.323.000,- Yang berasal dari dana DAU dan DAK.

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran adalah 103,11 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran ini dinilai **sangat baik** atau **sangat berhasil**



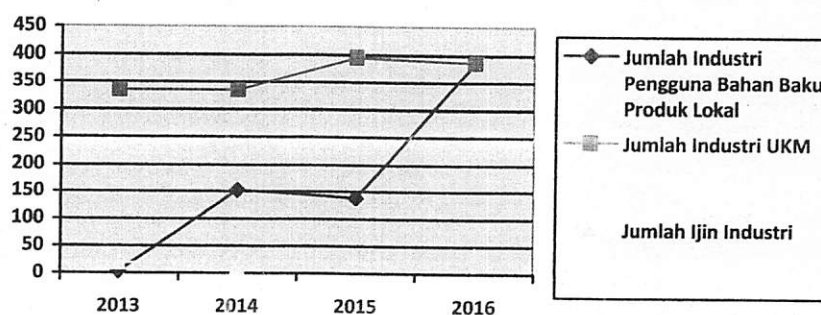
Pelatihan Perajin Anyaman Rotan Tingkat Dasar di Desa Terantang Kecamatan Mantangai dalam Rangka Pembinaan industri kecil dan

Berikut perbandingan capaian kinerja Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Tabel 22 Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal dari Tahun 2012-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah industri pengguna bahan baku produk lokal	IKM	3	152	138	387
2	Jumlah Industry UKM	IKM	335	335	395	387
3	Jumlah ijin industri meningkat	TDI	19	11	31	35

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal Tahun 2013-2016





- ✦ Sasaran "Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor". Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran di atas melalui 2 (dua) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan, yaitu :
- 1) Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan

Tabel 23 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai ekspor meningkat	US\$	40.000.000,00	11.540.728,19	28,85
2	Volume ekspor meningkat	Ton	15.000,00	8.776,90	58,51
Capaian Sasaran					43,68

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan anggaran Rp. 323.500.000,- dengan realisasi Rp. 320.090.560,-. Yang berasal dari dana APBD.

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran adalah 43,68 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran < 55 % dengan hasil **tidak baik atau tidak berhasil**, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dinilai **tidak baik atau tidak berhasil**. Ketidakterhasilan ini disebabkan karena menurunnya harga dari komoditas ekspor seperti karet dan turunnya permintaan pasar, khususnya dari negara-negara pengimpor / buyer (USA, Kanada, China, India, Lithuania, Israel, dan Latvia) dan turunnya harga komoditas karet.

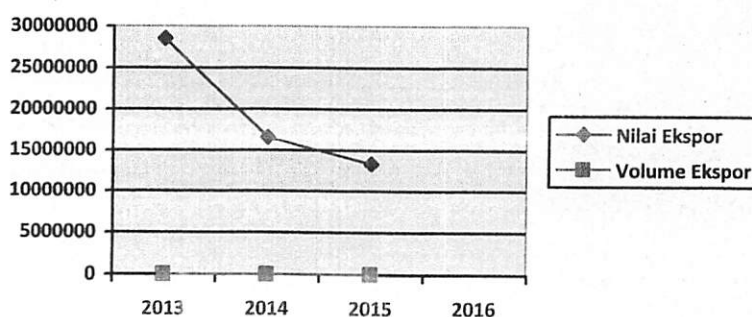
Berikut perbandingan capaian kinerja Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor dari tahun 2013 hingga tahun 2016.



Tabel 24 Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Nilai ekspor meningkat	US\$	28.508.668,69	16.540.632,16	13.380.778,92	11.540.728,19
2	Volume ekspor meningkat	Ton	11.094,32	9.576,00	9.332,14	8.776,90

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor Tahun 2013-2016



✚ Sasaran "Meningkatnya Perijinan Usaha". Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran di atas melalui 4 (empat) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
- 2) Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan
- 3) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)
- 4) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (APBD)

Tabel 25 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Perijinan Usaha

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah ijin usaha meningkat	SIUP	160	235	146,87 %
2	Jumlah pedagang kecil, menengah dan besar meningkat	Pedagang	160	235	146,87 %
Capaian Sasaran					146,87 %



Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan anggaran Rp. 1.584.239.000,- dengan realisasi Rp. 1.568.029.080,-. Yang berasal dari dana DAU dan DAK.

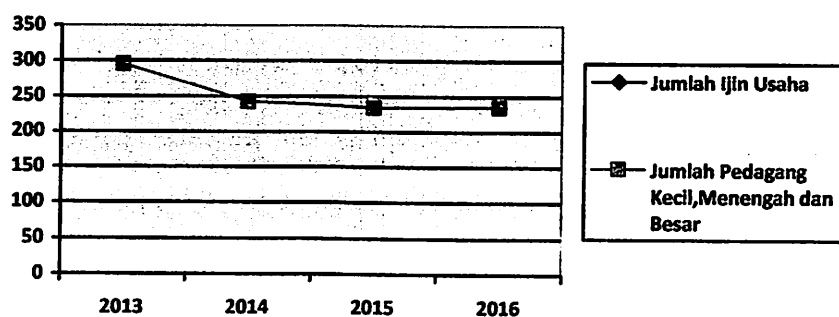
Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran adalah 146,87 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran diatas 100 % dengan hasil sangat **baik atau sangat berhasil**, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dinilai **sangat baik atau sangat berhasil**.

Berikut perbandingan capaian kinerja Meningkatnya Perijinan Usaha dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Tabel 26 Perbandingan pencapaian sasaran Meningkatnya Perijinan Usaha dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah ijin usaha meningkat	SIUP	295	242	234	235
2	Jumlah pedagang kecil, menengah dan besar meningkat	Pedagang	295	242	234	235

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Meningkatnya Perijinan Usaha Tahun 2013-2016



4. Sasaran "Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen". Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran di atas melalui 3 (tiga) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan, yaitu :



- 1) Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
- 2) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- 3) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah

Tabel 27 Evaluasi Pencapaian Sasaran Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah pengawasan barang beredar	kali	4	3	75 %
Capaian Sasaran					75 %

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan anggaran Rp. 95.860.200,- dengan realisasi Rp. 91.883.992,-. Yang berasal dari dana APBD.

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran adalah 75 %. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja menunjukkan capaian sasaran 70-84 % dengan hasil **baik atau berhasil**, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dinilai **baik atau berhasil**.



Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dipasar dalam rangka meningkatkan hubungan koordinasi tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum tentang perlindungan konsumen

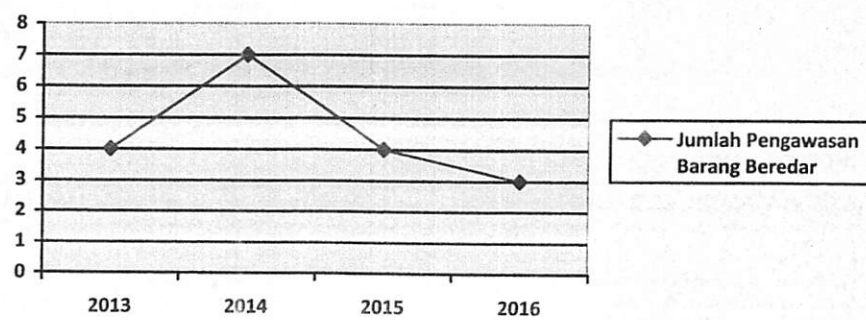
Berikut perbandingan capaian kinerja Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen 2013 hingga tahun 2016.



Tabel 28 Perbandingan pencapaian sasaran Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen dari Tahun 2013-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
I	Jumlah pengawasan barang beredar	kali	4	7	4	3

Berikut grafik dari capaian kinerja dan Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen Tahun 2013-2016





PENCAPAIAN INDIKATOR PADA RPJMD

12

Sasaran :

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal

Pada tahun 2016 beberapa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas mengalami perubahan berdasarkan hasil rapat evaluasi terhadap indikator kinerja utama. Perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2014 Kapuas tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018. "Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-KUKM dalam pengembangan ekonomi lokal. Sasaran strategis ini merupakan upaya mencapai Misi ke-5 RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yaitu "Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan". Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-KUKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 29. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi
I	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan ekonomi lokal	Persentase koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah aktif	Persen	$\frac{\sum \text{Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah}}{\sum \text{Seluruh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdata di Kabupaten Kapuas}} \times 100 \%$



Tabel 30. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aktif	Persentase	89,00	96,97	108,95

Berdasarkan Tabel 2 diatas bahwa tingkat capaian atau realisasi dari Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aktif Tahun 2016 memperoleh predikat sangat berhasil dengan nilai capaian 108,95 %. Sedangkan ditahun 2015 target hanya sebesar 87,00 dengan realisasi 91,37 atau dengan nilai capaian 105,02 %. Persentase koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah aktif mengalami peningkatan sebesar 3,93 % dibandingkan tahun 2015.

Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah aktif dapat diukur dengan bertambahnya kelembagaan koperasi yang berkualitas, hal ini dapat dilihat dengan jumlah koperasi aktif tahun 2015 sebesar 317 koperasi dan tahun 2016 sebesar 334 koperasi. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel 31. Capaian Indikator Sasaran Strategis Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
I	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aktif	Persentase	114,90	105,02	108,95

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

- Tersedianya dana sesuai alokasi.
- Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik.

Sehubungan dengan peningkatan kelembagaan dan kinerja koperasi ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :



- a. Terbatasnya personil baik dari segi kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan jumlah koperasi binaan di Kabupaten Kapuas sebanyak 334 koperasi dan 3855 UMKM.
- b. Masih rendahnya kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi dalam manajemen koperasi dan kurangnya loyalitas pengurus terhadap koperasi yang disebabkan oleh menjadi pengurus koperasi hanyalah sebagai pekerjaan sampingan bukan pekerjaan utama.
- c. Masih kurangnya pemahaman anggota koperasi akan hak dan kewajiban, sehingga masih banyak anggota yang lalai memenuhi kewajiban.
- d. Belum semua gerakan koperasi mau menggunakan koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi yang dapat mengangkat derajat ekonomi anggotanya

Untuk mengatasi masalah diatas, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas :

- a. Mengoptimalkan SDM yang ada serta bermitra dengan pihak ketiga, baik dengan lembaga perguruan tinggi maupun lembaga swadaya lainnya.
- b. Perlu penambahan pegawai dan peningkatan sumber daya manusia/ aparatur tentang koperasi
- c. Melakukan pembinaan terhadap kelembagaan koperasi
- d. Membimbing dan melatih pengurus dan pengawas koperasi untuk peningkatan kualitas SDM
- e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada koperasi maupun kepada kelompok-kelompok ekonomi produktif sebagai cikal bakal terbentuknya koperasi

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM :

- a. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan teknis pada masyarakat, sebagai upaya menumbuhkan WUB
- b. Memfasilitasi permodalan usaha UMKM dengan BUMN/BUMD
- c. Mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran/event tertentu dalam rangka promosi produk UMKM.



Program dan Kegiatan yang mendukung untuk mencapai target kinerja:

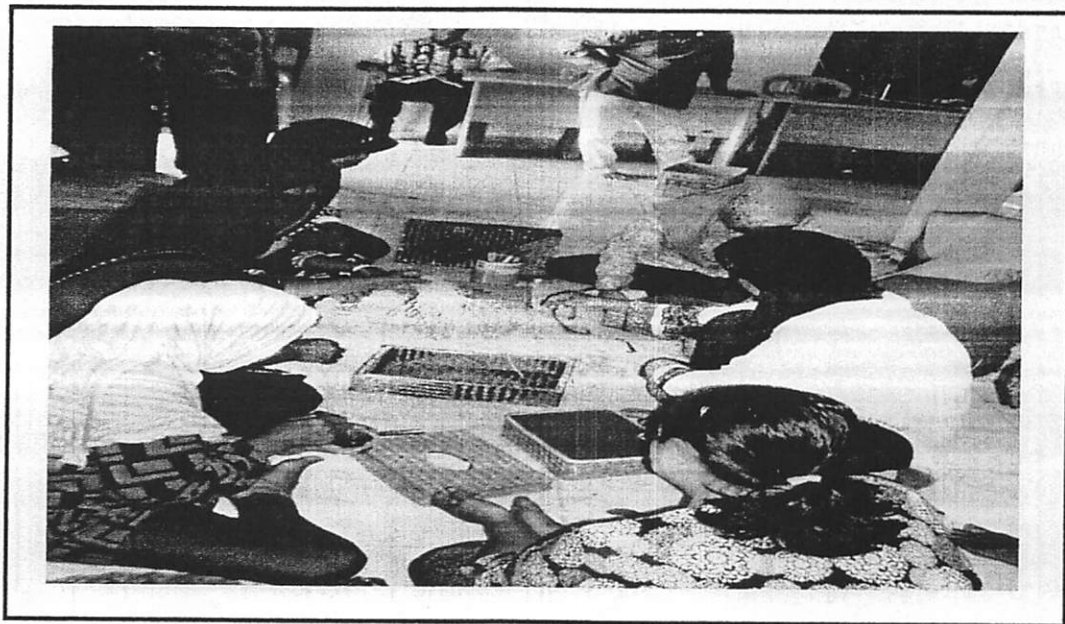
- a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
 1. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 24.500.000,- dengan hasil pelaksanaan adalah telah mendorong penumbuhan UMKM tahun 2016 sebesar 3855 unit usaha dimana jumlah wirausaha baru sebesar 1255 unit usaha.

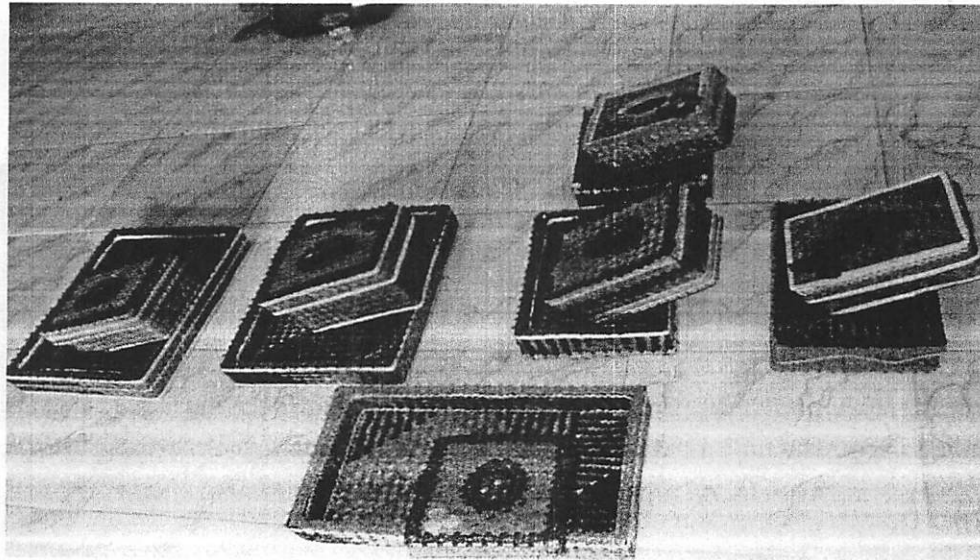


- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.290.000,-. Program ini dijabarkan dalam kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang



dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan UMKM tentang kewirausahaan yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang unggul





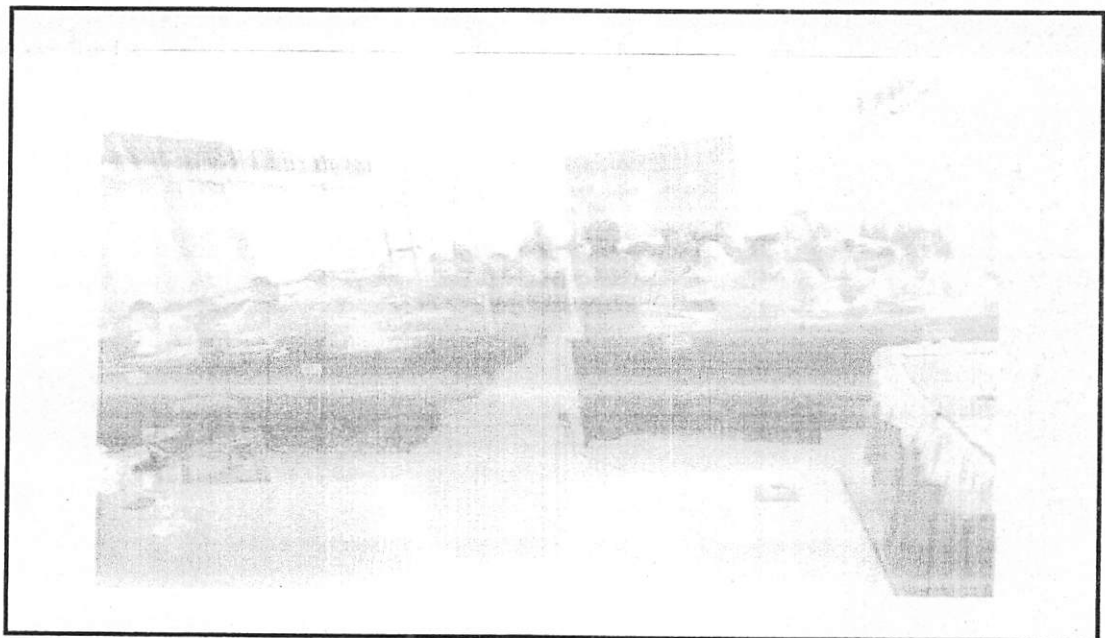
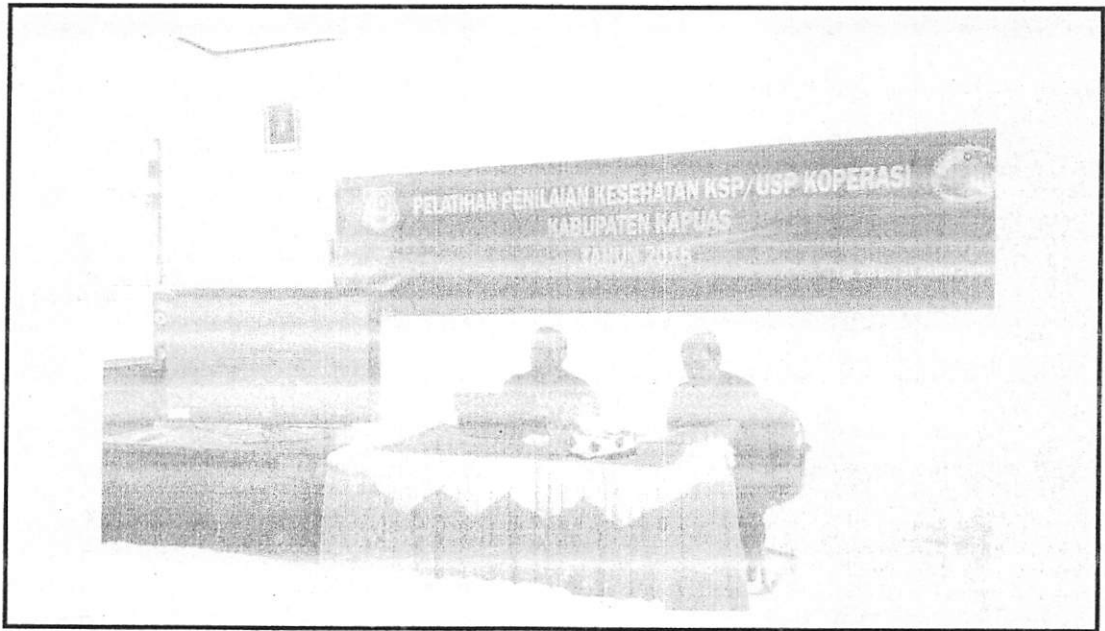
- c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.929.800,-. Program ini dijabarkan dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi badan pengawas koperasi yang handal.

Kegiatan lain dari penjabaran program ini adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian melalui pelatihan bagi pengurus/manajer koperasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus/manajer koperasi yang handal.

Kegiatan berikutnya adalah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi yang bertujuan memberikan penilaian terhadap koperasi di Kabupaten Kapuas yang menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian kepada koperasi yang berprestasi, mandiri dan sehat.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan (penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam) ini bertujuan memberikan penilaian yang optimal bagi KSP/USP-Koperasi guna meningkatkan terwujudnya koperasi yang sehat.







Tabel 31 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dalam Pencapaian sasaran Strategis

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 4.675.302.542,- atau 97,98 % dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 4.771.577.000,-

Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas untuk tahun anggaran 2016 adalah tersaji sebagai berikut :



**Tabel 32 Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Kapuas**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN			
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Hasil Retribusi Daerah			
	a) Retribusi Jasa Umum			
	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	8.000.000,-	6.585.000,-	82,31
	b) Retribusi Jasa Usaha			
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa aula)	15.000.000,-	30.000.000,-	200,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.000.000,-	36.585.000,-	159,06
B.	BELANJA PROGRAM			
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	142.382.000	136.072.603	95,57
	2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	86.900.000	82.388.302	94,81
	3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan/operasional dinas/operasional	59.713.500	58.600.500	98,14
	4) Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.130.000	20.120.000	99,95
	5) Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.302.000	24.109.980	91,67
	6) Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	55.302.000	55.301.375	99,99
	7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.850.000	21.681.900	99,23
	8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.850.000	14.466.000	97,41
	9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.640.000	5.640.000	100
	10) Penyediaan makanan dan minuman	56.380.000	55.275.000	98,04
	11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	352.046.500	352.046.500	100
	12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80.000.000	67.848.900	84,81
	Sub Jumlah	921.496.000	893.551.060	96,97
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1) Pembangunan gedung kantor	405.070.000	404.224.800	99,79
	2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	105.780.000	101.860.000	96,29
	3) Pengadaan peralatan gedung kantor	94.453.000	94.395.000	99,94
	4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.500.000	29.500.000	100
	5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.541.000	0	0
	6) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	1.000.000	340.000	34,00
	Sub Jumlah	661.344.000	630.319.800	95,31



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	55.845.000	52.998.000	94,90
	Sub Jumlah	55.845.000	52.998.000	94,90
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	110.043.000	106.176.750	96,49
	Sub Jumlah	110.043.000	106.176.750	96,49
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.500.000	5.493.000	99,87
	2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000	5.000.000	100
	3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.000.000	4.999.000	99,98
	4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000	4.999.000	99,98
	Sub Jumlah	20.500.000	20.491.000	99,96
VI.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			
	1) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	24.500.000	24.486.000	99,94
	Sub Jumlah	24.500.000	24.486.000	99,94
VII.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
	1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	66.290.000	66.190.000	99,85
	Sub Jumlah	66.290.000	66.190.000	99,85
VIII.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah			
	1) Pengembangan klaster bisnis	31.000.000	31.000.000	100
	2) Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk UKM dan koperasi	20.499.000	20.499.000	100
	3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000	19.566.750	97,83
	Sub Jumlah			



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
IX.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
	1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	30.000.000	20.817.000,-	69,39
	2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan	140.929.800	140.929.800,-	100,00
	3) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	10.000.000	10.000.000	100,00
	4) Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	25.000.000	24.910.000	99,64
	5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.000.000	30.000.000	100,00
	Sub Jumlah	230.929.800	230.839.800	99,96
X.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
	1) Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	9.320.000,-	7.552.300,-	81,03
	2) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	25.520.000,-	14.467.000,-	56,69
	3) Operasional dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	124.660.000,-	82.662.300,-	66,31
	Sub Jumlah	199.500.000,-	144.685.600,-	72,52
XI.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			
	1) Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	298.500.000	295.375.400	98,95
	2) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan	25.000.000	24.715.160	98,86
	Sub Jumlah	323.500.000	320.090.560	98,95
XII.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
	1) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	649.710.000	649.674.080	99,99
	2) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	10.000.000	9.084.500	90,85
	3) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	774.529.000	765.903.500	98,89
	4) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (APBD)	150.000.000	143.367.000	95,58
	Sub Jumlah	1.584.239.000	1.568.029.080	98,98
XIII	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
	1) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	183.040.000,-	182.624.800,-	99,77
	Sub Jumlah	183.040.000,-	182.624.800,-	99,77



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
	2) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	10.000.000	10.000.000	100
	Sub Jumlah	89.600.000	89.549.500	99,94
XIV.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			
	1) Pembinaan kemampuan teknologi industri	83.750.000	83.535.500	99,74
	Sub Jumlah	83.750.000	83.535.500	99,74
XV.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial			
	1) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	376.931.000	371.323.000	98,51
	Sub Total	376.931.000	371.323.000	98,51
XVI.	Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			
	1) Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi	21.000.000	21.000.000	100
	2) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	34.250.000	33.822.750	98,75
	Sub Jumlah	55.250.000	54.822.750	99,23
	JUMLAH BELANJA PROGRAM	4.771.577.000	4.675.302.542	97,98

Sedangkan Realisasi anggaran Pembangunan dengan rincian per jenis mata anggaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 33 Realisasi Anggaran Pembangunan dengan rincian per Jenis Mata Anggaran

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja			
I	Belanja Tidak Langsung	3.807.624.000	3.717.482.550	
II	Belanja Langsung			
	- Belanja Pegawai	198.474.000	186.848.833	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.845.850.000	2.770.343.709	
	- Belanja Modal	1.727.253.000	1.718.110.000	



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun anggaran 2016 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013 – 2018. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Kapuas 67,42 untuk tahun 2016 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran adalah :

Dari 11 sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2016 ternyata ada 5 (lima) sasaran yang mencapai diatas 100 %, 2 (dua) sasaran yang mencapai 100 %, 1 sasaran yang berada antara 70-84 % sisanya sebanyak 3 (tiga) sasaran masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Keberhasilan pencapaian 8 (tujuh) sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia/aparatur (100 %)
2. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan (100 %)
3. Meningkatnya jumlah usaha kecil/petani yang bermitra dengan usaha menengah/besar dan IKM (113,33 %)
4. Meningkatnya jumlah UMKM (178,55 %)



5. Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan yang mempunyai peringkat A/sehat (106,14)
6. Meningkatnya perijinan usaha (146,87 %)
7. Meningkatnya industri pengguna bahan baku produk lokal (103,11 %)
8. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen (75,00)

Disamping keberhasilan dalam pencapaian 8 sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran yang tidak berhasil dilaksanakan yaitu :

- Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang menerima bantuan modal (0 %)
- Meningkatnya jumlah dana yang disalurkan BPR/LKM/BUMN kepada koperasi dan UKM (0 %)
- Meningkatnya volume, nilai dan jenis komoditi ekspor (43,68%)

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tidak adanya penyaluran kepada koperasi dan UKM dikarenakan ada pemotongan anggaran di Kementerian.
2. Pemahaman masyarakat tentang berkoperasi belum maksimal.
3. Belum semua gerakan koperasi mau menggunakan koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi yang dapat mengangkat derajat ekonomi anggotanya.
4. Sebaran koperasi di Kabupaten Kapuas yang terlalu luas, sehingga membutuhkan sumber daya yang cukup besar dalam rangka melakukan pemeringkatan bagi koperasi berkualitas.
5. Produk IKM/UKM belum memenuhi standar ekspor dan perkembangan diversifikasi produk masih lambat.
6. Permintaan pasar turun, khususnya dari negara-negara pengimpor/buyer (USA, Kanada, China, India, Lithuania, Israel, dan Latvia) dan turunnya harga komoditas karet.
7. Belum maksimalnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.
8. Pelaksanaan program belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik dalam hal kompetensi aparat maupun pelaku usaha



4.2. PEMECAHAN MASALAH

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2016, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2017, yaitu sebagai berikut :

I. Secara Administratif

- a) Optimalisasi sumberdaya manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing – masing.
- b) Optimalisasi penggunaan dana secara efektif dan efisien guna mewujudkan parameter Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- c) Meningkatkan jaringan kerja dalam rangka memperoleh bantuan dana dari pusat (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementrian Koperasi dan UKM).
- d) Penentuan target indikator pada semua tataran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang telah ditetapkan sehingga pencapaian target indikator dapat lebih maksimal.

2. Secara teknis

a) Sektor Industri

- 1) Perlu lebih ditingkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholders dan upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas perlu dilakukan lebih intensif terus melakukan upaya diversifikasi produk.
- 2) Kepastian regulasi dan kebijakan ekonomi makro.
- 3) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur melalui instansi terkait serta kepastian regulasi.



b) Sektor Perdagangan

- 1) Meningkatkan kualitas produk lokal melalui beberapa kegiatan antara lain kajian pengembangan produk dan bantuan sarana usaha.
- 2) Perlu terus dilakukan upaya peningkatan mutu produk ekspor daerah, diversifikasi komoditi ekspor dan perluasan pasar ekspor.

c) Sektor Koperasi

- 1) Peningkatan kualitas SDM perlu terus dilakukan diantaranya melalui kegiatan pelatihan, magang dan bantuan tenaga ahli.
- 2) Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan sarana usaha, bantuan sertifikasi tanah sebagai agunan tambahan untuk akses modal dengan perbankan dan fasilitasi dengan lembaga keuangan perbankan.
- 3) Perlu terus diupayakan bantuan fasilitasi pemasaran, baik melalui promosi, jaringan kemitraan dan temu usaha bisnis.
- 4) Melakukan penyuluhan perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya berkoperasi, melakukan klasifikasi koperasi untuk memberikan penilaian koperasi yang berkualitas.